



**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, maka sebagai langkah awal diperlukan perencanaan strategis untuk melakukan pengukuran pencapaian kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi acara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal dan global.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan dalam 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pilihan Perindustrian, Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Wajib Koperasi agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah cepat dan dinamis seperti halnya dengan kondisi saat ini, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Oleh karena itu, Dinas Perindagkop & UKM telah berupaya untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang akan dicapai dan yang menjadi kendala/permasalahan dalam suatu organisasi, dengan kata lain Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaiannya dan lebih difokuskan pada peranan yang dapat diberikan dalam rangka mensinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat Tahun 2022.

Akhirnya, Rencana Kerja Dinas Perindagkop & UKM Tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Kepala Dinas,

H. M. Yadi Robyan Noor, SE., M.TP
Pembina Utama
NIP. 19620721 198811 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAYANAN RENJA SKPD TAHUN 2020	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020	7
II.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2020	10
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD	20
II.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	32
II.5. Penelahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN	
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	53
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	62
III.3. Program dan Kegiatan	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
IV.1 Program Prioritas	91
IV.2 Program Rutin	93
BAB V PENUTUP	97
V.1 Kaidah Pelaksanaan Renja	98

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah langkah awal penetapan kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggung jawaban. Kesalahan dalam pembuatan rencana kerja dapat berakibat tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah, oleh karena itu rencana kerja harus dibangun berdasarkan kondisi yang ada, dan didukung oleh berbagai instansi dan lembaga – lembaga yang ada dalam lingkup Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur ini bersinergi dan mengacu pada program Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terakhir Perubahan dengan peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;

18. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah;
19. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perindustrian No.13/MIND/PER/1/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/MIND/PER/10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Penganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
25. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran 4 Pasal 1 Butir 10);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; kemudian Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur .
29. Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/0213/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja tahun 2022 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Mensinergikan rencana pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM pada level nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.

- c) Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2022 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
- d) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim.

I.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020

II.1. Evaluasi triwulan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

II.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

II.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

III.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

IV.1 Program Prioritas

IV.2 Program Rutin

Bab V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja per triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja per Triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP TW 4	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Persen	20	0	0	0	20	18.90%	94,5
<i>Aktifitas Kegiatan : Pembinaan dan koordinasi</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan										94,5
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	milyar	14.50	0	0	0	14.50	11.83	81.59
		Disparitas harga antar wilayah	Persen	20	0	0	0	20	16.40%	121,95
<i>Aktifitas Kegiatan : Pembinaan, koordinasi dan promosi, pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok, penting dan monitoring harga.</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas										142,56
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	30	0	0	0	30	51.3	155,45
<i>Aktifitas Kegiatan : Koordinasi dan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok, penting dan monitoring harga.</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen										128

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP TW 4	CAPAIAN (%)	
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	Koperasi	10	0	0	0	10	43	430	
		UKM Unggulan	UKM	30	0	0	0	30	60	200	
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	Persen	4.6	0	0	0	0	4.5*	97,83	
<i>Aktifitas Kegiatan : Koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi dan UKM</i>											
Rata-rata capaian indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM									242,61		
Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran :			149,69								

II.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2020 implementasinya mencakup pelaksanaan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dalam 16 (enam belas) program yang merupakan bagian dari 4 (empat) sasaran selama tahun 2020, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

□ Sasaran I	:	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan
Dengan Indikator	:	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2020 ini adalah 20%, dan realisasi tingkat capaian hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 18,90%, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 94,50% .

□ Sasaran II	:	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas
Dengan Indikator	:	1. Nilai Ekspor Non Migas (Milyar Dollar) 2. Disparitas Harga Antar Wilayah (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II (dua) pada tahun 2020 ini adalah untuk indikator nilai ekspor non migas, ditetapkan targetnya sebesar US\$ 14.5 Milyar Dollar dan realisasi ekspor non migas sebesar US\$ 11.83 Milyar Dollar, sehingga persentase pencapaian indikator sasarnya sebesar 81,59%.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 20% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 16.40%, sehingga persentase pencapaian indikator sasarnya sebesar 121,95%. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota **semakin kecil** maka pencapaian semakin baik.

❑ Sasaran III	:	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.
Dengan Indikator	:	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III (tiga) pada tahun 2020 adalah dengan nilai 33 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh nilai 51.3, sehingga pencapaian indikator sasarnya sebesar 155,45 persen.

❑ Sasaran IV	:	Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi
Dengan Indikator	:	1. Koperasi Unggulan 2. UKM Unggulan 3. Persentase sumbangan Koperasi dan UKM terhadap PDRB

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV (empat) tahun 2020 adalah untuk indikator Koperasi Unggulan sebesar 10 Koperasi dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 43 Koperasi sehingga persentase pencapaian sasarnya sebesar 430 persen. Untuk indikator UKM Unggulan sebesar 30 UKM dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 60 UKM, sehingga persentase pencapaian indikator sasarnya sebesar 200 persen. Dan untuk Indikator Persentase sumbangan koperasi dan UKM terhadap

PDRB ditargetkan 4,6%, namun realisasinya 4,5%* (angka sementara), sehingga capainnya sebesar 97,83%.

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2020 dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana APBD untuk pembangunan sebanyak 16 (enam belas) program, maupun dari sumber dana APBN/Dana Dekonsentrasi sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci pengukuran kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Persen	20	18,90	94,50
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	milyar USD	14,5	11,83	81,59
		Disparitas harga antar wilayah	Persen	20	16,40	82
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	33	51,3	155,45
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	Koperasi	10	43	430
		UKM Unggulan	UKM	30	60	200
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	%	4,6	4,5*	97,83
Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran :				149,69		

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2020) dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan tahun terakhir 2019;

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019 dan 2018.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan
			2018	2019	2020	Tahun 2020
1	2	3	5	6	7	$8 = (7-6) / 6 * 100\%$
1	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	persen	18,44	17,77	18,90	0,06
2	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas	produk	6	0	0	0
3	Nilai Ekspor Non Migas	US\$	13.79	14.11	11,83	-0,16
4	Disparitas harga Antar Wilayah	persen	7	13,80	16,40	0,19
5	Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar	buah	11	0	0	0
6	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	nilai	0	38.4	51,3	0,34
7	Jumlah Koperasi Unggulan.	koperasi	61	16	34	1,13
8	Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UKM.	persen	68.85	0	0	0
9	UKM Unggulan	UKM	0	41	60	0.00
10	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	persen	12.83	4,5	4,5*	0
11	UKM yang Melaksanakan Kontak Dagang	UKM	210	0	0	0
12	Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.	Kop/ukm	407	-	-	0
13	Penumbuhan Jumlah WUB	WUB	1459	0	0	0

14	Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB	WUB	325	0	0	0
----	------------------------------------	-----	-----	---	---	---

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2020) dengan target jangka menengah (s.d 2023) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target jangka Menengah s.d 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	21	18,90	-10,0
2	Nilai Ekspor non Migas	Milyar USD	17.6	11,83	-32,78
3	Disparitas Harga Antar Wilayah	Persen	19	16,40	-13,68
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	42	51,3	22,14
5	Koperasi Unggulan	Koperasi	50	43	-14,00
6	UKM Unggulan	UKM	45	60	33,33
7	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB.	persen	4.9	4,5*	-6,25

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini 2020 dengan Standar Nasional

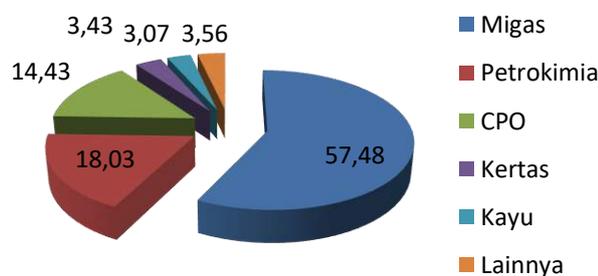
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi Nasional	Ket.
			2020		(+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	persen	18,90	19,87 (TW. II)	+
2	Nilai Ekspor Non Migas	US\$ M	11,83	111,25	-
3	Disparitas Harga antar Wilayah	Persen	16,40	5,642%	Disparitas harga rata-rata Kaltim dibandingkan dengan Harga rata-rata Nasional
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	51,3	49,07	-
5	Koperasi Unggulan	Koperasi	43	-	
6	UKM Unggulan	UKM	60	-	
6	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	persen	4,5*	5,1 (PDB Koperasi)	-

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. **Sasaran I** : Peningkatan kontribusi lapangan industri pengolahan.

Secara tahunan Industri Pengolahan terkontraksi sebesar 5,35% (yoy) membaik dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,74% (yoy). Pemulihan sudah mulai ditunjukkan dalam pertumbuhan triwulannya, dimana secara triwulanan Industri Pengolahan mampu tumbuh positif sebesar 4,3% (qtq) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 10,6% (qtq). Perbaikan kinerja industri pengolahan tersebut salah satunya bersumber dari aktivitas produksi kilang minyak Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan yang kembali beroperasi setelah mengalami penutupan sementara pada April-Mei 2020. Lebih lanjut, sub kategori industri pengilangan migas berkontribusi sebesar 57,48% terhadap PDRB Industri Pengolahan Kaltim sehingga perbaikan yang terjadi pada kinerja industri pengilangan migas akan langsung mendorong perbaikan kinerja industri pengolahan secara keseluruhan.

Pangsa PDRB Industri Pengolahan Kaltim berdasarkan sub kategori



Sumber: Bank Indonesia Kalimantan Timur

Pada triwulan III 2020 volume pengiriman BBM tercatat berada di level yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan mengalami kenaikan sebesar 15,74% (qtq). Pertamina RU V Balikpapan sendiri merupakan pemasok utama BBM di Kawasan Timur Indonesia. Peningkatan aktivitas pengiriman antar daerah juga terjadi untuk komoditas biodiesel yang pada triwulan III 2020 telah disalurkan 20.335 ton biodiesel dari Kaltim, lebih tinggi dibandingkan penyaluran periode sebelumnya sebesar 11,294 ton. Di Kaltim sendiri terdapat salah satu pemasok utama biodiesel utama untuk Pulau Kalimantan dan sekitarnya, yakni PT Kutai Refinery Nusantara.

Indeks produksi methanol Kaltim tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,94% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 23,57% (yoy). Peningkatan produksi methanol tersebut disebabkan oleh telah kembali meningkatnya produksi setelah triwulan sebelumnya sempat sedikit terkendala karena merebaknya pandemi. Selain itu, peningkatan tersebut juga ditujukan untuk mempercepat realisasi produksi tahun 2020 mengingat di akhir 2020 nanti akan dilakukan pemeliharaan pabrik secara rutin. Di sisi lain, kinerja industri petrokimia lainnya, yakni industri pupuk, mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Indeks produksi pupuk Kaltim tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,82% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 2,12% (yoy). Kontraksi yang lebih dalam tersebut disebabkan oleh adanya pemeliharaan rutin pabrik pupuk di Kaltim pada triwulan III 2020 sehingga produksi mengalami penurunan.

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dengan target 20 %, sampai dengan triwulan

ke IV 2020 realisasi capaian 18,90 % (y-on-y), berarti pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dapat dicapai sebesar 94,50%. Namun peran industri pengolahan migas masih dominan dalam komposisi kontribusi sektor industri terhadap PDRB, sekitar 57,48 % untuk migas, 42,52 % untuk non migas. Keadaan ini karena industri di Kalimantan Timur yang berbasis sumber daya alam renewable belum optimal.

- b. **Sasaran II** : Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi Ekspor Non Migas.

Memiliki 2 indikator sasaran Nilai Ekspor Non Migas dan Disparitas Harga Antar Wilayah, dimana Indikator sasaran Nilai Ekspor Non Migas dengan pencapaian terhadap target tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar 81,59% dengan nilai ekspor 11,83 milyar US Dolar. Turunnya nilai ekspor non migas ini disebabkan oleh karena adanya wabah Virus Corona yang melanda dunia. Sehingga banyak negara tujuan ekspor yang mengurangi permintaan komoditi non migas di pasar ekspor yaitu China, India, Philipina dan Jepang sebagai negara tujuan utama ekspor non migas Kaltim di tahun 2020.

Untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 20% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 16,40%, sehingga persentase pencapaian indikator sasarnya sebesar 82.00% (persentase semakin kecil semakin baik). Sehingga dapat diindikasikan bahwa perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar wilayah kabupaten/kota semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok bahan pokok melalui berbagai

kebijakan berjalan dengan baik. Sehingga kedepannya diperlukan upaya program untuk mencari peluang pasar tujuan ekspor baru dan upaya diversifikasi komoditi/produk non migas Kaltim.

c. **Sasaran III** : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK).

Terjadinya peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) mencapai kinerja 150.88 persen. Hal ini tentunya dampak dari meningkatnya pengetahuan dan wawasan para konsumen di Kalimantan Timur, yang mana di tahun 2019 dilakukan kegiatan Edukasi Konsumen Cerdas bagi pelajar SLTA dan komunitas di 6 Kab/Kota. Sebanyak 1.000 konsumen.

Sedangkan tahun 2020 Edukasi Konsumen Cerdas bagi pelajar SLTA dan ASN di 3 Kab/Kota sebanyak 600 konsumen. Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan pengawasan Barang dan Jasa di 10 Kab/Kota serta meningkatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui penyelesaian mediasi berbagai pengaduan sengketa konsumen. Seterusnya terbukanya berbagai sumber informasi pembudayaan konsumen melalui kegiatan talk show di TVRI, RRI dan Media Cetak (Koran).

d. **Sasaran IV** : Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi.

Dengan 3 indikator sasaran yaitu Koperasi Unggulan, UKM Unggulan dan Sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB. Untuk indikator sasaran Koperasi Unggulan jumlah Koperasi Unggulan di Kalimantan Timur untuk tahun 2020 ini kondisinya menaik, dimana pencapaiannya sebesar 430%. Koperasi unggulan adalah koperasi berkualitas dengan omzet lebih dari 2 milyar, anggota lebih dari 500 orang, asset diatas 1 milyar, telah

diaudit oleh auditor independen. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas sehat, SHU per anggota minimal 1X UMR.

Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai pembinaan berupa berbagai pelatihan antara lain diklat akutansi, manajemen kepada pengurus koperasi dan juga dengan dilakukannya pengawasan secara intensif terhadap kinerja koperasi yang ada.

Sedangkan untuk indikator sasaran UKM Unggulan dengan pencapaian mencapai 200%, mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya jumlah pelaku UKM dan peningkatan jumlah koperasi Kalimantan Timur, hal ini juga diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi di sektor Koperasi dan UKM. Hanya saja diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UKM dan SDM koperasi dalam rangka menghadapi persaingan dalam era MEA yang dimulai tahun 2015.

Indikator sasaran Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM pada tahun 2020 mencapai 4,5%*, dengan pencapaian terhadap target yang ditetapkan 4,6% adalah 97,83%*. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, KUKM juga berperan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan, mengingat jumlah usaha di Kalimantan Timur mencapai 307.238 unit dan sebagian besar 97,61% adalah KUKM.

- e. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi pada tahun 2020 sebanyak 20 orang dengan target 25 orang dan capaiannya adalah hanya 80%. Pencapaian kinerja tersebut terkendala dengan adanya aparat yang diikutkan dalam diklat tersebut harus mendukung tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

- f. Jumlah sarana pelayanan publik pada tahun 2020 sebanyak 10 sarana dan pencapaian terhadap target sebesar 100%. Untuk pelayanan publik terus diupayakan agar kedepan ada penambahan sarana pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan ataupun memperbaiki sarana yang ada.
- g. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi pada tahun 2020 sebanyak 6 dokumen dengan target juga 6 dokumen, sehingga pencapaian terhadap targetnya mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jenis dokumen baru yang dibutuhkan. - alternatif solusi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Sasaran I : Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang didalamnya terdapat kebijakan pembangunan industri untuk mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan, sebagaimana juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan industri diarahkan pada pengolahan sumber daya alam terbarukan yang tersedia di Kalimantan Timur, komoditi unggulan Kalimantan Timur adalah sawit, karet, kayu, rumput laut, udang, ikan dan gas alam dalam industri unggulan hulu agro, aneka, kimia dasar dan pangan.

Untuk menunjang pembangunan industri diatas maka pada tahun 2020 bidang industri mempunyai 1 program dan 3 kegiatan yaitu :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri
- Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri
- Kegiatan Pengembangan Informasi Industri

b. Sasaran II : Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas.

Untuk menunjang sasaran diatas maka pada tahun 2020 bidang Perdagangan mempunyai 3 program dan 6 kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan
2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan
 - Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan
3. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
 - Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri.
 - membangun jejaring dengan eksportir.
 - Koordinasi Program Pengembagnan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha.

Melalui program kegiatan tersebut telah dilakukan beberapa upaya untuk pencapaian target indikator kinerja, yaitu :

Koordinasi dengan pelaku usaha, pihak terkait untuk mensinergikan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting.

Mengoptimalkan forum kerjasama perdagangan dalam upaya ketercukupan pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim.

Melakukan upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar, monitoring harga dan stok bapokting dan pengembangan Sistem Informasi Perdagangan.

Mendorong peningkatan ekspor non migas non batubara melalui koordinasi dengan semua stake holder terkait dalam bentuk mencari informasi peluang pasar ekspor, pengumpulan data komoditi potensial ekspor dan mendorong penciptaan dan pendataan eksportir dan calon eksportir baru.

Fasilitas akses pasar luar negeri dan dalam negeri melalui misi dagang, business matching, forum kerjasama perdagangan dan business matching dengan buyer luar negeri.

- Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
- Melakukan pemantauan harga.
- Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
- Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
- Melakukan misi dagang dan pameran.
- Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
- Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
- Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
- Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
- Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.

- Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.
- Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

c. Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks keberdayaan konsumen yaitu :

- a. Peningkatan pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha di beberapa kabupaten/kota melalui edukasi.
- b. Kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha mulai tumbuh akan pentingnya barang dan atau jasa yang sesuai ketentuan untuk diperdagangkan.
- c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan atau jasa di beberapa kabupaten/kota.
- d. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang sesuai ketentuan.

Untuk menunjang meningkatkan indeks keberdayaan konsumen maka pada tahun 2020 bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang mempunyai 1 program dan 3 kegiatan yaitu :

1. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
 - Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen.
 - Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa.
 - koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen

d. Sasaran IV : Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi.

Untuk menunjang sasaran Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi maka pada tahun 2020 mempunyai 1 program dan 4 kegiatan yaitu :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM.
 - Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi
 - Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM
 - Produksi Pembiayaan dan Pemasaran
 - Pengawasan Koperasi

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran tersebut adalah :

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten / kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten / kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten / kota.
- Meningkatkan usaha pendampingan yang dilakukan Klinik Bisnis Koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
- Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan

classbusiness yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha, pemasaran, dll.

- Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat / bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program / kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten / kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam Online Data System (ODS) agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten / Kota.
- Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.
- Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UKM dan koperasi. Kemitraan yang

diberikan oleh perusahaan besar melalui pola CSR atau kemitraan dalam melakukan usaha seperti koperasi perkebunan dengan perusahaan kelapa sawit.

II.4 Harapan Yang Diinginkan Dengan Pusat

- Optimalisasi dan perluasan program kemitraan dengan lebih banyak pihak dan melibatkan lebih banyak UMKM dan koperasi.
- Program insentif bagi UMKM dalam rangka memperoleh HKI, Halal, SNI dll.
- Adanya aturan yang lebih kuat dan konkrit dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM.
- Adanya peninjauan kembali atau sosialisasi teknis tentang UU Nomor 23 Tahun 2014 mengingat pelaksanaan beberapa program masih menimbulkan kerancuan dalam implementasi di lapangan contohnya pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah Provinsi sedangkan lingkup pembinaan provinsi adalah usaha kecil dan sebagian besar sasaran KUR adalah usaha mikro yang merupakan binaan kabupaten/kota, pembinaan wirausaha baru yang merupakan program nasional sedangkan wirausaha baru identik dengan usaha mikro yang merupakan tugas kabupaten/kota untuk pembinaannya, dll.

3	30	6	1.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peleku usaha	Persentase pelaksanaan pengujian standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah contoh yang di uj	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	90 %	60 Contoh	90 %	920.372.832	Pengembangan Layanan Pengujian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peleku usaha	Persentase pelaksanaan pengujian standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah contoh yang di uj	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	90 %	60 Contoh	90 %	920.372.832	
3	30	6	1.02	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peleku usaha	Persentase pelaksanaan pengujian standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah Dokumen Sertifikat Akreditasi	persentase pengujian dan sertifikasi mutu produk	90 %	1 Dokumen	90 %	235.240.000	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peleku usaha	Persentase pelaksanaan pengujian standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah Dokumen Sertifikat Akreditasi	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	90 %	1 Dokumen	90 %	235.240.000	
3	30	6	1.02	4	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peleku usaha	Persentase pelaksanaan pengujian standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah Sertifikasi Kalibrasi Alat yang diterbitkan	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	90 %	2000 Sertifikat	90 %	776.600.000	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peleku usaha	Persentase pelaksanaan pengujian standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah Sertifikasi Kalibrasi Alat yang diterbitkan	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk	90 %	2000 Sertifikat	90 %	776.600.000	
TOTAL UPTD Batai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang														4.934.323.000											
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.0003 UPTD Pelatihan Koperasi																									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2	17				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
2	17	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
2	17	1.02	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	Skor kepuasan masyarakat terhadap uraian Bidang Perencanaan, Penganggaran, Koperasi dan UKM	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase laporan yang disusun sesuai ketentuan	89 %	20 keg	100 %	1.617.355.205	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	Skor kepuasan masyarakat terhadap uraian Bidang Perencanaan, Penganggaran, Koperasi dan UKM	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	89 %	20 keg	100 %	1.617.355.205	
2	17	1.06			Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah									Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah											
2	17	1.05	3		Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	Skor kepuasan masyarakat terhadap uraian Bidang Perencanaan, Penganggaran, Koperasi dan UKM	Tersedianya Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	89 %	12 Bulan	20 orang	4.800.000	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	Skor kepuasan masyarakat terhadap uraian Bidang Perencanaan, Penganggaran, Koperasi dan UKM	Tersedianya Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	89 %	12 Bulan	20 orang	4.800.000	
2	17	1.05	3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	Skor kepuasan masyarakat terhadap uraian Bidang Perencanaan, Penganggaran, Koperasi dan UKM	Tersedia Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	89 %	3x OT	20 orang	137.530.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	Skor kepuasan masyarakat terhadap uraian Bidang Perencanaan, Penganggaran, Koperasi dan UKM	Tersedia Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	89 %	3x OT	20 orang	137.530.000	
2	17	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									Administrasi Umum Perangkat Daerah											
2	17	1.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	28.681.052	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	28.681.052	
2	17	1.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	58.660.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	58.660.000	
2	17	1.06	3		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	83.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	83.000.000	
2	17	1.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	3.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	3.840.000	
2	17	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	17	1.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	30 UNIT	224.832.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	30 UNIT	224.832.000	
2	17	1.06			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	17	1.06	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	5.000.000	
2	17	1.06	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	188.704.545	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	188.704.545	
2	17	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	17	1.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	28.462.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	28.462.800	
2	17	1.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	35.047.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	35.047.000	
2	17	1.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	186.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	186.850.000	
2	17	1.09	7		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	614.890.100	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aparatur	[?]	Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop	0 [?]	12 Bulan	12 bulan	614.890.100	
2	17	9			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											
1.529.847.296														1.529.847.296											

2	17	5	1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							1.529.847.296	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							1.529.847.296				
					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koperasi dan UKM	[7]	Jumlah Peserta Pelatihan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan	0 [7]	300 orang	660 kopu km	1.529.847.296	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kopera si dan UKM	[7]	Jumlah Peserta Pelatihan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan	0 [7]	300 orang	660 kopu km	1.529.847.296
							Jumlah Koperasi dan UKM yang Terbait			300 Koperasi dan UKM							Jumlah Koperasi dan UKM yang Terbait			300 Koperasi dan UKM			
TOTAL UPTD Pelatihan Koperasi											4.747.500.000												4.747.500.000

2	17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
2	17	7	1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan									
2	17	7	1.01	1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koperasi dan UKM	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	Jumlah UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran	Jumlah Wira usaha pemula	1 %	175 UKM	10 wirausaha	
2	17	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
2	17	8	1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah									
2	17	8	1.01	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koperasi dan UKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM	Jumlah wira usaha mandiri	3 %	60 kegiatan	1 wirausaha	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
3	30	2	1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar									
3	30	2	1.03	3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha	Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	jumlah pelaku usaha yang diawasi	jumlah pelaku usaha yang tertib perijinan nya	10 IKK	10 Pelaku Usaha	10 pelaku usaha	
							Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)			10; 57 Perusahaan; IKK			
3	30	2	1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)									
3	30	2	1.04	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha	Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA	Jumlah eksportir baru yang menggunakan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	255 Eksportir	5 Eksportir	3500 lembar	
							Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)			10; 57 Perusahaan; IKK			

3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										
3	30	4	1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi										
3	30	4	1.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha	Persentase ketersediaan Bapokting; Disparitas harga antar wilayah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Laporan Ketersediaan Bapokting	300; 19 %; %	5 kegiatan	12 bulan		
3	30	4	1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										
3	30	4	1.02	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha	Persentase ketersediaan Bapokting; Disparitas harga antar wilayah	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan harga dan stok	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	300; 19 %; %	15 Pelaku Usaha	21 jenis		
3	30	4	1.02	2 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha	Persentase ketersediaan Bapokting; Disparitas harga antar wilayah	Jumlah Pasar murah yang Dilaksanakan	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau	300; 19 %; %	10 kegiatan	21 jenis		
3	30	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR										
3	30	5	1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi										
3	30	5	1.01	3 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	5 %	2 orang	2 orang		
3	30	5	1.01	5 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	5 %	4 orang	2 orang		
3	30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										
3	30	6	1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										
3	30	6	1.01	1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha , Konsumen	Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Jumlah Peserta Sosialisasi edukasi	1. Pengaduan yang dapat diselesaikan 2. Konsumen yang telah diberikan edukasi	10; 57 Perusahaan; IKK	1000 Konsumen	100 %; 1000 konsumen		
3	30	6	1.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha , Konsumen	Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Jumlah Pengaduan yang diterima	1. Pengaduan yang dapat diselesaikan 2. Konsumen yang telah diberikan edukasi	10; 57 Perusahaan; IKK	15 Pengaduan	100 %; 1000 konsumen		

3	30	6	1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota										
3	30	6	1.03	1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha , Konsumen	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan	15 %	100 Pelaku Usaha	24 barang dan jasa		
3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										
3	30	7	1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri										
3	30	7	1.02	1 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku usaha ,	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pengembangan Produk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran	5 Produk	14 orang	10 orang		
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										
3	31	2	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi										
3	31	2	1.01	2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	Jumlah penyusunan kebijakan	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	2 Industri	3 Dok	5 Dokumen	Penambahan dua Jasa Konsultan kegiatan yang di tunda tahun 2021 k	
3	31	2	1.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	2 Industri	1 Dokumen	5 Dokumen		
3	31	2	1.01	5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	2 Industri	7 Dok	5 Dokumen		
3	31	2	1.01	6 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	2 Industri	1 Dokumen	5 Dokumen		
3	31	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI										
3	31	3	1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi										
3	31	3	1.01	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku industri	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	Jumlah industri yg difasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan.	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	5 %	5 industri	17 industri		
3	31	3	1.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaku industri	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata	Jumlah industri yang dilakukan pengawasan	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan	5 %	12 industri	17 industri		

TOTALUPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang												
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.0003 UPTD Pelatihan Koperasi												
2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
2	17	5	1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
2	17	5	1.01	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koperasi dan UKM	[?]	Jumlah Peserta Pelatihan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan	0 [?]	300 orang	660 kopukm
							Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih			300 Koperasi dan UKM		
TOTAL UPTD Pelatihan Koperasi												

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan social, berikut arah kebijakan RKP tahun 2022 :

1. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
2. Diversifikasi Ekonomi
3. Pemulihan daya beli dan usaha
4. Reformasi perlindungan Sosial
5. Reformasi Peningkatan Kualitas SDM
6. Reformasi Iklim Investasi
7. Reformasi Kelembagaan

sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9)

meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Berdasarkan Rancangan RKP tahun 2022 kebijakan nasional sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

A. Sektor Koperasi & UKM

1. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional
2. Perhatian khusus pada usaha mikro kecil dengan program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui program Fasilitas Sertifikasi HAKI.
4. Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi dengan program Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi termasuk di daerah tertinggal dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
5. Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial.

Berkaitan Kebijakan Nasional di sektor Koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan program kegiatan tahun 2022 telah selaras dengan kebijakan nasional tersebut. Program yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan rencana kerja yang disusun adalah sebagai berikut Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan,

Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial, program ini dilaksanakan dalam rangka membantu usaha mikro kecil dalam memperoleh akses pembiayaan dan Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional.

Dalam hal mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha telah dilaksanakan program yang membantu pengembangan usaha KUKM. Demikian pula halnya kebijakan pengembangan kewirausahaan telah dilaksanakan dan direncanakan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi dan pelatihan ketrampilan teknis bagi bagi pelaku koperasi.

Kebijakan nasional penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, dalam hal ini revitalisasi pasar dan PLUT merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, akan tetapi menimbang kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, kebijakan tersebut masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut diatas sangat diharapkan dukungan pendanaan dari pusat melalui DAK agar kegiatan revitalisasi pasar dan PLUT dapat diwujudkan di Kalimantan Timur.

B. Sektor Industri

1. Meningkatkan Nilai Tambah sektor Industri
2. Pertumbuhan Industri :
 - a. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar pulau jawa
 - b. Penumbuhan Populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha.

- c. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)
3. Pembangunan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa :
- a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA, Menciptakan nilai tambah, menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim dan pariwisata.
 - b. Percepatan Pembangunan Konektivitas/Infrastruktur.
 - c. Pengembangan SDM dan IPTEK.
 - d. Pengembangan regulasi dan Kebijakan
 - e. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian Insentif fiskal dan non-fiskal.

Berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional berdasarkan arah pembangunan kebijakan nasional, jika dikaitkan dengan Visi dan Misi Dinas perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM sudah sejalan dan selaras. Dimana pada sektor industri, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (Delapan) Kawasan Industri strategis diantaranya Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung, Kawasan Industri Perdagangan dan jasa Samarinda, Kawasan Industri berbasis migas dan kondensat Bontang, Kawasan Ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan, Kawasan Industri Berbasis Pertanian Paser dan PPU, Kawasan Industri Pertanian Kukar dan Kubar, dan Kawasan Strategis Perbatasan Mahakam Ulu.

Dengan telah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Maloy, Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), hal ini tentunya sudah selaras dengan Arah Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yaitu Pengembangan Perwilayahan Industri di Luar Pulau Jawa. Sampai saat ini KEK MBTK masih dalam tahap pembangunan Infrastruktur, dan Tangki Timbun serta telah terbentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Provinsi Kalimantan Timur Melalui Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2015 Tanggal 11 Februari 2015, dimana progres pembangunan tangki timbun saat ini masih belum berjalan lancar karena dianggap kurangnya Review Detail Engineering Design (DED) 'Unit Persampahan Industri dan Dokumen Review Detail Engineering Design (DED 'Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri . Oleh karena itu dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat diharapkan, dimana hal ini menjadi pengaruh besar terhadap awal dimulainya Operasionalisasi KEK MBTK.

Dengan beroperasinya KEK MBTK diharapkan terjadi penumbuhan Populasi Industri yang berskala besar maupun sedang, serta tumbuhnya peningkatan daya saing dan produktivitas nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja dimana hal ini sangat selaras dengan arah kebijakan Pembangunan Industri Nasional .

C. Sektor Perdagangan

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah.
 - a. Pemantauan dan informasi harga & stok kebutuhan bahan pokok dan barang strategis.
 - b. Penyusunan Prognosa Kebutuhan Bahan Pokok dan Strategis.

- c. Penanganan/ pemantauan jalur distribusi bahan pokok dan barang strategis.
 - d. Sebagai Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim.
 - e. Sosialisasi Perlindungan Konsumen
 - f. Sosialisasi Cinta Produk Indonesia
2. Mendorong peningkatan kualitas produk Indonesia dan ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi.
- a. Pengawasan Barang Beredar di 10 Kabupaten/Kota.
 - b. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Standarisasi Bidang Perdagangan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan skema kerjasama perdagangan internasional.
 - Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding) melalui pengembangan tagline promosi bersama antar Kementerian dan pengembangan nation branding.
 - Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa dengan penyediaan informasi/katalog produk buatan Indonesia dan melakukan upaya aktif untuk menjadikan Indonesia pemasok jaringan produksi global.
 - d. Mendorong para pengusaha untuk ekspor dan mencetak para eksportir baru.
 - Pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor.
 - Peningkatan ekspor produk KUMKM melalui program kemitraan, fasilitasi ekspor diversifikasi produk dan standirisasi dan inovasi.

Program yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2022 diatas secara umum telah bersinergi atau sejalan dengan program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melalui Rencana Kerja (Renja) 2022 melalui kegiatan yang didanai oleh APBD dan didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat (APBN), sebagai berikut penyelarasan target Nasional dengan daerah :

Penetapan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi	Target Nasional
Urusan Koperasi dan UKM				
1	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	12%	50%
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	0,31%	50%
Urusan Perdagangan				
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	1%	5,96% - 7.86%
2	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha	70%	55%-75%
3	Meningkatnya keberdayaan dan	Persentase barang beredar yang diawasi yang	100%	42%

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi	Target Nasional
	kepercayaan konsumen	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
4	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	85%	90%
5	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	31,91%	50%-75%
6	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	70%	91%
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	17%	5.9%
8	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak	1%	3%-5%
Urusan Perindustrian				

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi	Target Nasional
1	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	4,17%	6.8%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor kemampuan keuangan Daerah Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	9.64%	18.3%
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	12.55	151.9 (nilai)
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	94916 orang	20.6 juta
5	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	27,6 Triliun	425.3 Triliun

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

4.1 Tujuan dan Sasaran

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan Perubahan RPJMD

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara
	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi

Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur . Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

2. Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non Migas dan Batubara

Hingga saat ini kondisi perekonomian Kalimantan Timur masih bertumpu pada sektor migas dan batubara, namun seiring dengan semakin berkurangnya potensi kedua produk tersebut hanya untuk beberapa tahun kedepan maka pemerintah harus berupaya untuk mencari produk alternatif sebagai pengganti. Sektor industri non migas secara nasional terus meningkat dan sejak tahun 1990 telah menjadi sektor paling dominan menggantikan sektor pertanian namun sektor ini masih terpusat di pulau Jawa dan mulai berangsur–angsur mulai memasuki pulau Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan.

Sektor Pertambangan, Penggalian dan sektor Industri Pengolahan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Kalimantan Timur. Nilai tambah sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding sektor lainnya. Kondisi ini ditopang oleh perkembangan pada subsektor Industri Gas Alam Cair (LNG) dari sisi harga. Sehingga meskipun terjadi penurunan tingkat produksi, tapi karena adanya peningkatan harga yang cukup signifikan, maka terjadi kenaikan nilai tambah yang cukup besar.

Disamping itu juga tengah dikembangkan produk CPO, dimana Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Orientasi pasar industri CPO sebagian besar untuk ekspor namun bahan baku industri ini 100% diperoleh dari dalam negeri.

3. Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas

Sektor perdagangan dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang merupakan salah satu pilar strategis bagi kesinambungan kinerja ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dilakukan dengan menyederhanakan sistem perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih diutamakan. Khususnya perdagangan Kalimantan Timur dimana kebutuhan dasar ekonomi masyarakat lebih banyak didatangkan dari luar provinsi dan konektivitas antar wilayah dalam provinsi juga masih menjadi kendala.

4. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.

Masalah Utama Konsumen saat ini adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Rendahnya kesadaran konsumen tentang haknya berpotensi mengurangi kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen semakin perlu diberdayakan untuk membuat keputusan yang optimal, memahami preferensinya masing - masing dan pilihan - pilihan yang tersedia, mengetahui hak - haknya, mengerti kapan haknya di langgar serta mengajukan komplain dan meminta ganti rugi apabila diperlukan.

Keberdayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 cara yaitu perlindungan konsumen dan pendidikan konsumen.

Menurut undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara itu pendidikan konsumen segala upaya yang bertujuan membekali konsumen dengan informasi dan keterampilan untuk membekali tantangan di pasar serta meningkatkan niatnya dengan pemasar, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraannya.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif, maka pemerintah perlu menumbuhkan keberdayaan konsumen. Indikator yang menggambarkan terwujudnya kondisi keberdayaan konsumen (IKK).

Indeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajibannya konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen ini dinilai dapat dijadikan dasar untuk membentuk kebijakan perlindungan konsumen 5 (lima) Tahun kedepan (2019 - 2023) guna meningkatkan keberdayaan konsumen melalui berbagai upaya edukasi kepada konsumen sebagai langkah preventif terhadap exses negatif

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non Migas dan batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB	4,17 %
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara	2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non Batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	18.25%
				Disparitas harga antar wilayah	18%
		3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen (nilai)	54
3	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	4	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Nilai Omset Koperasi	1,01 Triliun
				Nilai Omset UKM	5.9 Triliun

III.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumens kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang di koordinasikan Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM) , barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa sumber daya untuk menghasilkan keluar atau output dalam bentuk barang atau jasa.

Penetapan program biasanya didasarkan pada strategi terbaik yang dapat dirumuskan dalam pencapaian sasaran. Sedangkan pemilihan kegiatan biasanya didasarkan pada arah kebijakan yang berhubungan langsung dan mempunyai hubungan paling erat dengan pencapaian program. Adapun program prioritas Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 telah selaras dengan program prioritas yang ditetapkan pada RKPD 2022 Berikut adalah Program Prioritas :

Arah Kebijakan RPJMD	Program Prioritas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2022
Pengembangan Industri Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri	Program Pengembangan Ekspor
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM - Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola Kemitraan dan pendampingan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Selain program prioritas yang telah selaras dengan RKPD , berikut ini disampaikan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2022 dan
Perkiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
2														
2	17													
2	17	1												
2	17	1	1											
2	17	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Dokumen	400.000.000	APBD	6 Dokumen	550.000.000
							Kegiatan Forum Perangkat Daerah Sektor Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM se Kaltim	Balikpapan		1 Laporan				
2	17	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Laporan	124.027.000			50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
2	17	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	109.959.046			308.585.000
2	17	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	641.400.00			200.000.000
2	17	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	17	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	16.769.918.500			17.611.201.008
2	17	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Non PNS Tenaga Teknis dan Pengelola Administrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	53 Orang	4.761.600.104			5.000.000.000
							Jumlah Tenaga Pengamanan Aset dan Kantor			14 Orang				
							Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			300 kegiatan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
						12 bulan								
2	17	1	1	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi (laporan)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	5,700,000			5,700,000
2	17	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Keuangan bulanan dan semesteran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 Laporan	20,000,000			20,000,000
2	17	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	9,713,800			9,713,800
2	17	1	1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
2	17	1	1.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Orang	718.731.000			700.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah										
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapannya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	100%	107 Unit	326.342.000			350.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
		Pemerintahan Daerah		Semua Kelurahan										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah makan minum kegiatan dan snack setahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7800 Kotak/Porsi	282.600.000			280.000.000				
			jumlah makan minum rapat dan snack setahun(diluar kantor)			4207 Kotak/Porsi								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang di Cetak(Jenis)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30 Jenis	152.162.200			150.000.000				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1224 Eksemplar	18.000,000			18.000.000				
2	17	1	1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
2	17	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel (Custom Interior Gedung Kantor)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	451.780.000			450.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
2	17	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Perbaikan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	60 Unit	25,000,000			100.000.000
2	17	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	17	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Setahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1500 Materai	15,230,000			15.200.000
2	17	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Komunikasi yang terbayarkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 Mbps	796,899,551			800.000.000
							Jasa Listrik Yang Terbayarkan			5600000 Kwh				
							Jasa Sumber Daya Air Yang Terbayarkan			8809 M3				
2	17	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Kebersihan Kantor Luas Gedung Kantor yang dipelihara Kebersihannya (m2)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	145000 m2	1.412.544.920			1.502.000.000
2	17	1	1.1				Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan (Jenis)			70 Jenis				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Penyediaan Jasa Pengiriman Surat dan Paket			12 Unit					
			Penyediaan Jasa Publikasi Setahun			51 Kali/Lembar					
2	17	1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan setahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	35 Unit	320.967.500		320.000.00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Gedung	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	200 Unit	642.248.417		640.000.000
					Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Genset			3850 Liter			
					Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat kantor			112 Unit			
					Pemeliharaan Pintu Kantor			76 Unit			
					Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor			1000 m2			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
2	17	3												
2	17	3	1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										
2	17	3	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
2	17	3	1	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang patuh administrasi sesuai per-UU-an; Jumlah Koperasi Unggulan	Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40/10 Koperasi/Koperasi	100 kegiatan	576.519.240		100	1.625.103.000
2	17	3			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									
2	17	3			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
2	17	4	1	2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an	Pengukuran penilaian kesehatan koperasi, diklat penilaian kesehatan koperasi	Se Prov.Kaltim	50 Koperasi	50 kegiatan	234,348,760		50	
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									
2	17	5	1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
2	17	5	1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah KUKM yang mendapat pelatihan (DAK)	Jumlah KUKM yang mendapatkan Pelatihan (DAK)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	800 KUKM	900 orang	2.159.073.194			2.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
				Semua Kelurahan									
2	17	6											
2	17	61											
2	17	61	1										
2	17	61	1	1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi berkualitas	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan	Se Prov.Kaltim	10 Koperasi	150 Koperasi	719.410.000	150 Koperasi	1,083,402,000
2	17	7											
2	17	7	1										
2	17	7	1	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Jumlah WUB; UKM Unggulan	Jumlah UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran, Sertifikasi Halal, Gebyar UKM (Hari Koperasi dan UKM)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50/35 WUB/UKM	175 UKM	271.143.400	200 UKM	1,008,402,000
2	17	8											
2	17	8	1										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
2	17	8	1	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM Naik Kelas	Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 UKM	60 kegiatan	701.986.600			541.701.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									
3	30	2	1		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)									
3	30	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Jumlah eksportir baru yang menggunakan SKA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10/54,3 Perusahaann/IKK	5 Eksportir	252.930.500		5 Eksportir	862,010,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
3	30	4											
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
3	30	4	1										
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi													
3	30	4	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase ketersediaan Bakopting; Disparitas harga antar wilayah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300/20 %/%	5 kegiatan	467.892.020	5 kegiatan	500.000.000
3	30	4	1		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
3	30	4	1	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Bakopting; Disparitas harga antar wilayah	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan harga dan stok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300/20 %/%	10 Pelaku Usaha	429.925.30	10 Pelaku Usaha	421,800,000
3	30	4	1	1	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Bakopting; Disparitas harga antar wilayah	Jumlah Operasi Pasar yang Dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300/20 %/%	5 kegiatan	148.290.00	5 kegiatan	100,000,000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
3	30	5	1		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					1,097,069,500			
3	30	5	1	1	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Nilai Ekspor Non Migas Non BatuBara;	Jumlah Calon Eksporthir dan Eksporthir yang	Semua Kabupaten/Kota, Semua	1,4/15,9 Milyar	2 orang	339,853,500	2 orang	968.013.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Nilai ekspor non migas	difasilitasi dalam misi dagang	Kecamatan, Semua Kelurahan	US\$/Milyar US\$					
3	30 5 1 1	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas Non BatuBara; Nilai ekspor non migas	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,4/15,9 Milyar US\$/Milyar US\$	4 orang	845.796.740		2 orang 768.013.500
3	30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
3	30 6 1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								
3	30 6 1 1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	Jumlah Peserta Sosialisasi edukasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	1000 Konsumen	800,000,000		1000 Konsumen 550.000.000
3	30 6 1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	Jumlah Pengaduan yang diterima	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	15 Pengaduan	1,000,000,000		15 Pengaduan 550.000.000
3	30 6 1	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								
3	30 6 1 1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	100 pelaku Usaha	1,200,000,000		100 pelaku Usaha 1.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
3	30	7	1		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri								
3	30	7	1	1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pengembangan Produk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Produk	14 orang	722.960.880		995.820.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
3	31	2	1		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						3,622,500,000		
3	31	2	1	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan; Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Jumlah penyusunan kebijakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1/20 %/%	3 Dok	286.018.300		353.479.166
3	31	2	1	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan; Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1/20 %/%	1 Dokumen	124.304.60		353.479.166
3	31	2	1	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan Industri Pengolahan; Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1/20 %/%	5 Dok	2.440.000.000		1.923.906.875

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
3	31	2	1	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan; Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1/20 %/%	1 Dokumen	172.177.100		1 Dokumen	353.479.166
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI									
3	31	3	1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				1,045,930,000					
3	31	3	1	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata.	"Jumlah industri yg difasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan.	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%5 industri		222.732.000			800.000.000
3	31	3	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata.	"Jumlah industri yang dilakukan pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%12 industri		623.198.000			
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
3	31	4	1		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
3	31	4	1	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui	Pembinaan industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	jumlah Perusahaan industri yang terdaftar di SIINAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Industri	185 Perusahaan	242.860.300		200 Perusahaan	345.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
3	31	4	1	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Pembinaan industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	Jumlah Dokumen Data Informasi Industri yang disebarluaskan / dipublikasikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Industri	1 Dokumen	158.709.900		1 Dokumen	260.000.000
3	31	4	1	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pembinaan industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Industri	100 Perusahaan	225,809,800		100 Perusahaan	338.439.586
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.0002 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 kegiatan	1.511.454.928			1.557.000.000				
			Jumlah Tenaga Non ASN dan Pengamanan Aset			24 orang								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan		12 unit	3.000.000				12.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%10 orang	118.600.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						79,542,363			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100%240 Buah	14.360.500				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8 uniy	25.840.000				27.930.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100%5 kegiatan	6,000,000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Cetak	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100%16114 Lembar	45.965.000				45.965.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5 buku	10.760.000				11.300.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100%	23 Unit	214.200.000			226.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai dalam setahun	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100%	544 lembar	10.440.000			10.962.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100%	12 Bulan	151.099.46			217.450.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100%	63 Alat	296.339.880			414.150.000
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor			12 Bulan				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100%	1 Unit	35.821.300			37.650.000
			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan			1 Unit				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Semua Kelurahan						
	Pengembangan Layanan Pengujian	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	jumlah contoh yang di uji	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	60 Contoh	920.372.832		70 Contoh	1.050.000.000
	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	Jumlah Sertifikasi Akreditasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	0 sertifikasi	235.240.000		1 sertifikasi	547.890.000
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	Jumlah Alat yang Dikalibrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	2100 Sertifikat	776.600.000		2300 Sertifikat	901.800.000
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.0003 UPTD Pelatihan Koperasi										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	1.617.355.200			1.617.355.205

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						185,000,000			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	4.800.000			25.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	35 OT	137.530.00			160.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						131,000,000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	28.681.052			30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	58.660.00			59,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	59,000,000			37.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	3.840.000			5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	224.832.00			1.000.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	5,000,000			5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	188,704,545			200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						825,000,000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	28.462.800			30,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Se Prov.Kaltim	100%	12 Bulan	35.047.000			35.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Se Prov.Kaltim	100%	12 Bulan	186.850.000			160.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Se Prov.Kaltim	100%	12 Bulan	614.890.100			600,000,000	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah KUKM yang mendapat pelatihan	Tersedianya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Se Prov.Kaltim	800 KUKM	12 Bulan	1.529.847.29		850	1.500.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
Total seluruhnya Pagu INdikatif Dinas dan UPTD							53.052.588.000			59.613.216.967

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berisikan Program dan Kegiatan prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 beserta Pendanaannya yang mengimplementasikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019 -2023 . strategi tahun ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di provinsi Kalimantan Timur dalam tema RKPD tahun 2022 **“Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam rangka mendukung IKN”** sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masingmasing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya ,berikut Program Prioritas dan Program Rutin Tahun 2022 :

IV.1 Pendanaan Program Prioritas

Program yang berkaitan dengan target Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah , langkah langkah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam menjalankan Program Prioritas sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah industri

pengolahan non migas dan non batubara di kawasan peruntukan

industri sebanyak 2 industri dengan Pendanaan Sebesar Rp 3,022,500,000

- a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat(Kegiatan Dekranasda)
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

2. Program Pengembangan Ekspor

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara sebesar 5%.

Dengan pendanaan Sebesar Rp. 1,185,650,240

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Subkegiatan :

- a. *Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan*

b. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target Koperasi sehat sebesar 10% dengan pendanaan Sebesar Rp. 576,519,240

a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

SubKegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target UKM naik kelas sebesar 1%. Dengan dana Sebesar Rp. 271,143,400

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

5. Program Pengembangan UMKM

Pencapaian indicator program ini diarahkan pada persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital sebesar 3% dengan dana sebesar Rp 701.986.600

- a. Kegiatan pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

IV.2 Pendanaan Program Rutin

Program Rutin yang selalu diselenggarakan secara berkala, yang mendukung program Prioritas, sebagai berikut :

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Sebesar Rp 1,046,107,320
 - Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
 - Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
SubKegiatan
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Sebesar Rp 845,930,000
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi

3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp 5.110.472.832
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

SubKegiatan

- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

- c. kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (UPTD BPSMB)

Sub Kegiatan

- Verifikasi Mutu Produk
- Pengembangan Layanan Pengujian
- Pengembangan Layanan Sertifikasi

4. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Sebesar Rp 252.931.320

Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Sebesar Rp 627.380.000

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

SubKegiatan

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
6. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Sebesar Rp 1,529,847,298 (UPTD Pelatihan Koperasi)
- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sebesar Rp 34.046.326.916 dengan rincian :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp 16.769.918.508 dengan jumlah PNS 86 orang
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Belanja Non Asn) Rp 4.855.492.510 dengan jumlah Tenaga Administrasi Teknis dan non Teknis berjumlah 93 orang dan 24 orang tenaga Pamdal .
 - Operasional Kegiatan Dinas dan UPTD sebesar Rp 12.420.915.898

BAB V

PENUTUP

Renja Atau Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2023 berdasarkan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Tema Pembangunan RKPD tahun 2022 adalah "Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN". Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2022 yaitu menguatkan daya saing daerah seperti SDM, infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi yang berbasis IT. Penyusunan Renja tahun 2022, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar Dinas Perindagkop kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan Renja tahun 2022 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan Renja tahun 2022 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan pelaksanaan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

V.1 Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Tahun 2022 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Renja 2022 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Renja Tahun 2022 merupakan rencana kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dilaksanakan

dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku Industri Pelaku KUKM dan Pelaku usaha untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;

3. Renja tahun 2022 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022;
4. Setiap Unit Bidang dan UPDTD KepalaPD/Dinas/Instansi lingkup Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usahak Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan mempedomani RENJA Tahun 2022 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renja K/L 2022.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renja Dinas Perindagkop & UKM tahun 2022 wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPTD beserta unit- unit dibawahnya dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan

sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Renja Indagkop Dan UKM berdasarkan RKPD Tahun 2022;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD tahun 2022;
8. Bappeda melakukan evaluasi hasil evaluasi akhir tahun pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) tahun 2022 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;